

INKESRA 2021

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEPENDUDUKAN | KESEHATAN DAN GIZI | PENDIDIKAN | KETENAGAKERJAAN
TARAF DAN POLA KONSUMSI | PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN | KEMISKINAN



INKESRA 2021

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEPENDUDUKAN | KESEHATAN DAN GIZI | PENDIDIKAN | KETENAGAKERJAAN
TARAF DAN POLA KONSUMSI | PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN | KEMISKINAN



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KONAWA SELATAN 2021

No. Publikasi : 74050.2134
Katalog BPS : 4102004.7405
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xii + 69 halaman

Naskah :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
BPS Kabupaten Konawe Selatan

Gambar Kulit :
Eka Amalia, S.Tr.Stat
BPS Kabupaten Konawe Selatan

Diterbitkan Oleh :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan

Dicetak Oleh :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan

Sumber Ilustrasi :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

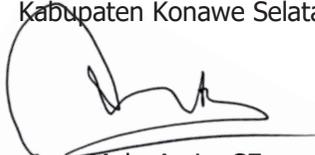
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Konawe Selatan 2021

merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Konawe Selatan yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan penduduk Kabupaten Konawe Selatan antar waktu. Data yang digunakan bersumber dari BPS maupun Dinas atau Badan terkait. Data BPS bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan dan untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut tujuh bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, serta Kemiskinan yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Andoolo, Desember 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Konawe Selatan



Muh. Amin, SE.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
SINGKATAN DAN AKRONIM.....	xii
1. KEPENDUDUKAN	1
1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin	4
1.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk	5
1.3 Angka Beban Ketergantungan	7
1.4 Penduduk Menurut Usia Perkawinan Pertama	9
1.5 Penggunaan Alat/Cara KB.....	11
2. KESEHATAN DAN GIZI.....	15
2.1 Derajat dan Status Kesehatan penduduk	18
2.2 Pemanfaatan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan.....	20
3. PENDIDIKAN	23
3.1 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.....	26
3.2 Tingkat Pendidikan	29
3.3 Tingkat Partisipasi Sekolah	31
3.4 Kualitas Pelayanan Sekolah	34
4. KETENAGAKERJAAN	37
4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka.....	40
4.2 Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan.....	41
4.3 Lapangan Usaha	42
4.4 Status Pekerjaan.....	43

5. TARAF DAN POLA KONSUMSI	45
5.1 Pengeluaran Rumah Tangga.....	47
5.2 Konsumsi Energi dan Protein	49
6. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN.....	51
6.1 Sumber Air pada Rumah Tangga.....	54
6.2 Fasilitas Rumah Tinggal.....	55
6.3 Status Kepemilikan Rumah Tinggal	56
7. KEMISKINAN.....	59
7.1 Perkembangan Penduduk Miskin	61
7.2 Garis Kemiskinan.....	62
SUMBER DATA	65

<https://konselkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Halaman

KEPENDUDUKAN

Tabel 1.1	Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin, 2010-2020.....	4
Tabel 1.2	Kepadatan dan Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan, 2020	6
Tabel 1.3	Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan, 2010-2020.....	9
Tabel 1.4	Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke atas Menurut Status Perkawinan, 2018-2020	11
Tabel 1.5	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB, 2018-2020.....	14

KESEHATAN DAN GIZI

Tabel 2.1	Perkembangan Angka Harapan Hidup, 2010-2020	18
Tabel 2.2	Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin, 2017-2020	19
Tabel 2.3	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Menurut Karakteristik, 2020	20
Tabel 2.4	Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan, 2020	21
Tabel 2.5	Jumlah Puskesmas dan Rasionya terhadap Penduduk, 2018-2020....	22

PENDIDIKAN

Tabel 3.1	Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Kabupaten Konawe Selatan, 2018-2020	29
-----------	---	----

Tabel 3.2	Persentase Penduduk 5 Tahun Keatas Menurut Status Pendidikan, 2020	30
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin, 2018-2020.....	33
Tabel 3.4	Perkembangan Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid-Sekolah, 2016/2017-2019/2020	36

KETENAGAKERJAAN

Tabel 4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka, 2019 - 2020	40
Tabel 4.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan, 2019-2020	42
Tabel 4.3	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan, 2019-2020.....	43
Tabel 4.4	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan, 2019-2020	44

TARAF DAN POLA KONSUMSI

Tabel 5.1	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran, 2019-2020	48
Tabel 5.2	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Non Makanan Menurut Kuintil Pengeluaran, 2020.....	49
Tabel 5.3	Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari Penduduk menurut Kuintil Pengeluaran, 2019	50

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Tabel 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Mata Air Untuk Keperluan Sehari-hari, 2019-2020	54
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2019-2020.....	56
Tabel 6.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2019-2020.....	57

KEMISKINAN

Tabel 7.1	Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Konawe Selatan, 2014-2020.....	62
Tabel 7.2	Garis Kemiskinan, 2016-2020.....	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Konawe Selatan, 2010-2020	4
Gambar 1.2 Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Konawe Selatan, 2010 -2020	8
Gambar 2.1 Angka Harapan Hidup Kabupaten Konawe Selatan, 2017-2020.....	18
Gambar 3.1 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Konawe Selatan, 2018-2020	27
Gambar 3.2 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Konawe Selatan, 2018-2020	28
Gambar 4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Konawe Selatan, 2019- 2020	41
Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas di Kabupaten Konawe Selatan, 2019-2020	56
Gambar 7.1 Tren Tingkat Kemiskinan, 2016-2020	62

SINGKATAN DAN AKRONIM

AKB	Angka Kematian Bayi
APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASI	Air Susu Ibu
BPS	Badan Pusat Statistik
KB	Keluarga Berencana
MA	Madrasah Aliyah
MTs	Madrasah Tsanawiyah
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SDKI	Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
SD	Sekolah Dasar
SM	Sekolah Menengah
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SP	Sensus Penduduk
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TFR	Total Fertility Rate (Angka Fertilitas Total)
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka

“

KEPENDUDUKAN

”



Isu kependudukan yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan angka kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Jumlah penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali serta distribusi penduduk yang tidak merata dapat menjadi masalah di waktu mendatang.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Komposisi penduduk dengan penduduk usia produktif yang lebih rendah akan menciptakan angka beban ketergantungan yang tinggi. Kondisi tersebut nantinya akan kembali membawa Indonesia kepada masalah baru yang lainnya. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

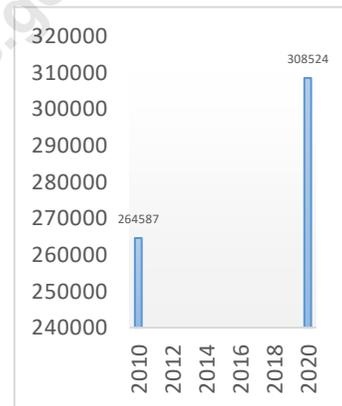
KEPENDUDUKAN

1.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Jumlah penduduk yang besar menjadi salah satu masalah klasik kependudukan yang terjadi di Indonesia, lebih khusus di Kabupaten Konawe Selatan. Jumlah penduduk Kabupaten Konawe Selatan tercatat sebesar 308.524 jiwa atau sekitar 11,75 persen dari total penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara yang berjumlah 2.624.875 jiwa pada tahun 2020. Bila dibandingkan dengan tahun 2010, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Konawe Selatan yaitu 1,50 persen. Dengan kata lain, selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir jumlah penduduk Kabupaten Konawe Selatan telah mengalami penambahan penduduk sebesar 43.937 jiwa.

Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Selatan menjadi wilayah dengan persentase jumlah penduduk terbesar kedua setelah Kota Kendari. Pada tahun yang sama jumlah penduduk Kota Kendari mencakup sekitar 14,38 persen penduduk seluruh Sulawesi Tenggara. Besarnya proporsi penduduk Konawe Selatan bagi Sulawesi Tenggara tersebut memang sejalan dengan besarnya luas wilayah Konawe Selatan. Konawe Selatan yang memiliki 25 kecamatan merupakan kabupaten terluas yang ada di Sulawesi Tenggara.

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Konawe Selatan, 2010-2020



Tabel 1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin, 2010 - 2020

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan per Tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	264.587	-	106,09
2020	308.524	1,50	105,63

Sumber : Sensus Penduduk 2010 & Sensus Penduduk 2020

Selama tahun 2010-2020, *sex ratio* Kabupaten Konawe Selatan cenderung konstan pada angka 106. Rasio jenis kelamin tersebut memiliki makna bahwa setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 106 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki 6 persen lebih banyak dibanding perempuan. Hal ini dapat disebabkan karena adanya migrasi penduduk ke Kabupaten Konawe Selatan yang lebih didominasi oleh penduduk laki-laki dengan tujuan utama migrasinya untuk mencari pekerjaan imbas dari berdirinya beberapa perusahaan swasta nasional pada sektor pertanian maupun sektor pertambangan.

1.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Salah satu persoalan terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi di Kabupaten Konawe Selatan yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Ketimpangan distribusi penduduk juga terjadi di Kabupaten Konawe Selatan. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, di wilayah lain masih ada wilayah yang hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat setempat.

Selama ini persebaran penduduk di Kabupaten Konawe Selatan tidak merata antar kecamatan. Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2010-2020, pada tahun 2020 penduduk terbanyak berada di wilayah Kecamatan Tinanggea sebanyak 24.971 jiwa atau 8,09 persen dari total penduduk Kabupaten Konawe Selatan. Wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya berada di Kecamatan Konda (7,04 persen dari total penduduk Kabupaten Konawe Selatan), dan Kecamatan Laeya (6,96 persen dari total penduduk Kabupaten Konawe Selatan).

Pada tahun 2020 penduduk Kabupaten Konawe Selatan sebesar 11,75 persen dari total penduduk Sulawesi Tenggara. Jumlah penduduk terbesar mendiami Kecamatan Tinanggea, Konda, dan Laeya.

KEPENDUDUKAN

Tabel 1.2 Kepadatan dan Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan, 2020

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Persentase Penduduk	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
Tinanggea	78,63	8,09	24.971
Lalembuu	109,53	5,20	16.057
Andoolo	89,83	3,42	10.563
Buke	81,04	4,72	14.558
Andoolo Barat	110,69	2,84	8.751
Palangga	85,88	4,79	14.792
Palangga Selatan	69,30	2,40	7.392
Baito	59,89	2,92	9.004
Lainea	49,33	3,25	10.038
Laeya	78,23	6,96	21.458
Kolono	33,78	3,69	11.397
Kolono Timur	43,31	1,74	5.360
Laonti	27,82	3,34	10.309
Moramo	62,07	5,07	15.634
Moramo Utara	55,93	2,87	8.867
Konda	172,25	7,04	21.724
Wolasi	35,90	1,83	5.656
Ranomeeto	235,66	6,82	21.049
Ranomeeto Barat	115,62	2,59	7.986
Landono	77,15	2,72	8.392
Mowila	112,57	4,44	13.700
Sabulakoa	82,23	1,76	5.436
Angata	57,65	5,45	16.811
Benua	82,19	3,53	10.897
Basala	159,25	2,50	7.722
Konawe Selatan	73,44	100,00	308.524

Sumber : Hasil SP2020 September

Kepadatan penduduk pada wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Kendari jauh lebih tinggi dibanding dengan wilayah lainnya

Jika dilihat dari kepadatan penduduk di setiap kecamatan, Kecamatan Ranomeeto menjadi kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi. Pada tahun 2019, di Kecamatan Ranomeeto tercatat sebanyak 235-236 jiwa per km². Sementara itu, Kecamatan Laonti merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah, yakni hanya ditempati oleh 27-28 jiwa per km².

Kepadatan penduduk di seluruh kecamatan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan. Kepadatan penduduk pada wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Kendari jauh lebih tinggi dibanding dengan wilayah lainnya. Hal ini seperti yang terjadi pada Kecamatan Ranomeeto dan Kecamatan Konda karena memiliki akses yang cukup mudah menuju ibukota provinsi dan sejumlah area publik seperti bandara, terminal, dan rumah sakit sehingga banyak berdiri daerah pemukiman baru (perumahan, asrama, dan lain sebagainya).

1.3. Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur

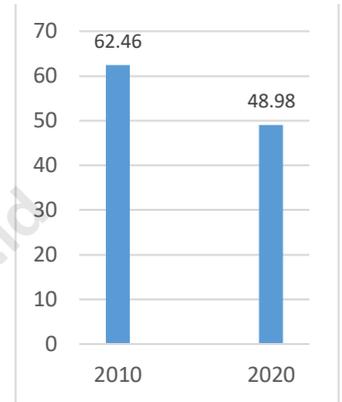
KEPENDUDUKAN

seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Selama periode 2010-2020 angka beban ketergantungan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2010 angka beban tanggungan Kabupaten Konawe Selatan sebesar 62,46 persen, hal ini berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 62-63 penduduk usia tidak produktif. Sampai pada tahun 2020, angka beban tanggungan penduduk produktif berada pada posisi 48,98 persen. Artinya, setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban sekitar 48-49 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia, rasio ketergantungan yang terus cenderung menurun diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Namun perlu diketahui bahwa di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja tetapi di sisi lain mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika diantara mereka banyak yang tidak bekerja. Mereka kategori usia produktif tapi tidak dapat memanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) untuk membiayai konsumsi makanan dan non makanan penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) maupun yang tidak produktif lagi (usia 65 tahun keatas). Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berdasarkan Tabel 1.3 terlihat bahwa dalam 10 tahun terakhir terdapat tren penurunan angka beban ketergantungan di Kabupaten Konawe Selatan. Pada Tahun

Gambar 1.2 Angka Beban Ketergantungan Konawe Selatan, 2010-2020



Sumber : Sensus Penduduk Tahun 2010 dan 2020

2010, angka beban ketergantungan masih menyentuh angka 62,46 persen dan menurun tajam menjadi 48,98 persen. Fenomena ini menunjukkan telah terjadi bonus demografi di Kabupaten Konawe Selatan dimana jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada penduduk usia tidak produktif.

Tabel 1.3 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan, 2010-2020

Tahun	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65 Tahun +	Angka Beban Ketergantungan (jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	34,83	61,56	3,62	62,46
2020	28,12	67,12	4,76	48,98

Sumber : SP2010, SP2020

Pada Tabel 1.3. dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Kabupaten Konawe Selatan yang semakin didominasi oleh penduduk usia produktif. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kabupaten Konawe Selatan menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sementara itu, proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) semakin bertambah dari 3,62 persen pada tahun 2010 menjadi 4,76 persen pada tahun 2020.

1.4. Penduduk Menurut Usia Perkawinan Pertama

Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya pertambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan. Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya.

KEPENDUDUKAN

Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang wanita untuk melakukan perkawinan pertama. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2020, komposisi penduduk menurut status perkawinan menunjukkan bahwa persentase penduduk yang berstatus belum kawin pada kelompok laki-laki usia 10 tahun ke atas lebih besar dibanding perempuan pada kelompok usia yang sama, yakni 38,54 persen dibanding 28,01 persen. Sementara itu penduduk yang berstatus kawin pada kelompok perempuan sebesar 60,37 persen, dibandingkan laki-laki yang hanya 57,16 persen. Begitu pula penduduk yang berstatus cerai, kelompok perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki, baik yang cerai hidup maupun cerai mati. Sekitar 11,61 persen perempuan kelompok usia diatas 10 tahun berstatus janda (status perkawinannya cerai mati atau cerai hidup). Sedangkan laki-laki yang berstatus duda (status perkawinannya cerai mati atau cerai hidup) sejumlah 4,29 persen pada kelompok usia yang sama.

Persentase penduduk berstatus kawin mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2018 persentase penduduk berstatus kawin sebesar 62,24 persen dan menurun menjadi 60,05 persen pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 persentase penduduk yang pernah menikah turun kembali menjadi 58,74 persen.

Sedangkan persentase penduduk yang pernah bercerai (cerai hidup dan cerai mati) mengalami kecenderungan kenaikan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018 persentase jumlah penduduk yang pernah bercerai sebanyak 6,14 persen dan naik menjadi menjadi 6,51 persen pada tahun 2019, hingga akhirnya meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 7,90 persen. Dengan melihat data tersebut, dimana angka perceraian kian meningkat maka perlu adanya program untuk membangun ketahanan keluarga. Terlebih, semenjak munculnya wabah covid di Indonesia banyak sektor ekonomi yang terkena dampak dari wabah tersebut. Keadaan ekonomi yang sulit dapat memicu pertengkaran sehingga menyebabkan perceraian.

Tabel 1.4 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Status Perkawinan, 2018-2020

[Diolah dari Hasil Susenas]

Status Perkawinan	Tahun		
	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(3)
Belum Kawin	31,62	33,44	33,36
Kawin	62,24	60,05	48,74
Cerai	6,14	6,51	7,90

1.5. Penggunaan Alat/Cara KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama

KEPENDUDUKAN

untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Berdasarkan masa kerjanya, alat/cara KB dibedakan menjadi MKJP atau Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (meliputi: tubektomi/MOW, vasektomi/MOP, IUD dan susuk KB/implant), Non MKJP (meliputi: suntikan KB, pil KB, kondom/karet KB, intravag/kondom wanita/diafragma) dan cara tradisional. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

Berdasarkan Hasil Susenas tahun 2020, persentase wanita berusia 15-49 tahun dan berstatus kawin yang pernah menggunakan KB sebesar 19,77 persen. Angka tersebut menurun dibandingkan angka tahun 2018 yaitu 21,29 persen. Sementara, wanita berusia 15-49 tahun dan berstatus kawin yang sedang menggunakan mengalami kenaikan dalam 2 tahun terakhir sebesar 0,62 persen, dimana pada tahun 2018 sebesar 57,31 kemudian mengalami peningkatan menjadi 58,37 persen pada tahun 2020.

Tabel 1.5 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB, 2018-2020

[Diolah dari Hasil Susenas]

Status Penggunaan Alat/Cara KB	Tahun		
	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Pernah Menggunakan	21,29	-	19,77
Sedang Menggunakan	57,31	-	58,37
Tidak Pernah Menggunakan	21,40	-	21,86

“
KESEHATAN
DAN GIZI
”



<https://konsekkabbps.go.id>

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Upaya Pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit; polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

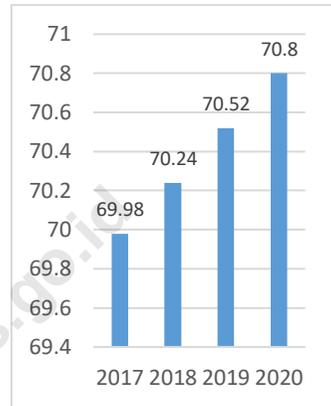
Pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka KesakitanPenduduk, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

2.1. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Tingkat kesehatan di suatu negara salah satunya dapat dilihat dari besarnya angka usia harapan hidup penduduknya. Sumber data perkembangan angka harapan hidup, pada tabel 2.1 dibawah ini merujuk pada publikasi Indeks Pembangunan Manusia. Semakin membaiknya kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia, termasuk di Kabupaten Konawe Selatan, telah diiringi dengan peningkatan Angka Harapan Hidup (e0). Dalam 10 tahun terakhir, Kabupaten Konawe Selatan tercatat mengalami kenaikan angka sebesar 1,12 poin. Peningkatan angka harapan hidup ini karena sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: semakin baik dan teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan disertai semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Gambar 2.1 Angka Harapan Hidup Konawe Selatan, 2017-2020



Sumber IPM BPS

Tabel 2.1 Perkembangan Angka Harapan Hidup(e0), 2011-2020

Tahun	Angka Harapan Hidup (tahun)
(1)	(2)
2011	69,66
2012	69,71
2013	69,75
2014	69,77
2015	69,87
2016	69,93
2017	69,98
2018	70,24
2019	70,52
2020	70,80

Sumber : IPM BPS

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, maka Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Hasil Susenas tahun 2020 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Kabupaten Konawe Selatan mencapai 15,68 persen. Angka Kesakitan penduduk berjenis kelamin laki-laki tahun 2020 lebih tinggi dari penduduk berjenis kelamin perempuan, yakni masing-masing sekitar 15,90 persen untuk laki-laki dan 15,44 persen untuk perempuan. Lebih tingginya angka kesakitan penduduk laki-laki dibandingkan dengan angka kesakitan penduduk perempuan tidak terlepas laki-laki yang menjadi tulang punggung untuk keluarganya.

Tabel 2.2 Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin, 2017-2020

[Diolah dari Hasil Susenas]

Tahun	Jenis Kelamin		Laki-Laki + Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	14,04	14,76	14,40
2018	16,42	16,44	16,43
2019	17,07	18,59	17,82
2020	15,90	15,44	15,68

2.3. Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya. Seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa/kelurahan.

Tabel 2.3 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Menurut Karakteristik, 2020

[Diolah dari Hasil Susenas]

Karakteristik	2020
(1)	(5)
Melahirkan di fasilitas kesehatan	39,94
Melahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan	95,86

Pada tahun 2020, sebanyak 39,94 persen wanita usia 15-49 tahun yang pernah kawin melahirkan di fasilitas kesehatan. Jumlah tersebut turun jauh dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 62,96 persen. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya fasilitas Kesehatan yang tutup akibat pandemi covid-19. Sementara itu, persentase perempuan usia 15-49 tahun pernah kawin di Konawe Selatan yang melahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan pada tahun 2020 sebesar 95,86 persen.

Besarnya persentase perempuan yang melahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan dibandingkan dengan yang melahirkan

di fasilitas kesehatan ini menunjukkan bahwa kendatipun tidak melangsungkan proses persalinan di fasilitas kesehatan, beberapa dari mereka tetap memilih untuk menjalani proses persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan, sekalipun itu di rumah. Hal tersebut menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat terutama ibu hamil akan keselamatan selama proses persalinan.

Tabel 2.4 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan, 2020

[Diolah dari Hasil Susenas]

Jenis Kelamin	Pengguna Jaminan Kesehatan
(1)	(2)
Laki-Laki	35,89
Perempuan	46,95
Laki-Laki + Perempuan	41,18

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. BPJS Kesehatan adalah badan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan JKN. Pemanfaatan jaminan kesehatan tersebut menjadi indikator penting bagi pemerintah nasional maupun daerah untuk melihat sejauh mana kebijakan bantuan kesehatan yang disediakan bagi pemerintah mampu dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Berdasarkan Tabel 2.4, terlihat bahwa pada tahun 2020, persentase penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan secara umum sebesar 41,16 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, persentase penggunaan jaminan kesehatan bagi penduduk perempuan di Konawe Selatan lebih tinggi bila dibandingkan dengan penduduk laki-lakinya.

KESEHATAN DAN GIZI

Persentase penduduk perempuan yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan adalah sebesar 46,95 persen. Sementara persentase penduduk laki-laki yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan adalah sebesar 35,89 persen.

Tabel 2.5 Jumlah Puskesmas dan Rasionya terhadap Penduduk, 2018-2020

Puskesmas dan Rasionya	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Puskesmas	24	24	24
Rasio Puskesmas per 30.000 Penduduk	2,32	2,29	2,33

Sumber: Catatan Administrasi Dinkes Kabupaten Konawe Selatan

Berdasarkan Tabel 2.5 menunjukkan bahwa tidak terjadi penambahan ketersediaan sarana puskesmas pada tahun 2020 di Konawe Selatan. Dengan demikian, jumlah puskesmas yang terdapat di Konawe Selatan pada tahun 2020 adalah sebanyak 24 unit yang tersebar di berbagai kecamatan di Konawe Selatan. Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 2,33 yang berarti rata-rata setiap 1 puskesmas melayani kurang lebih sebanyak 69.900 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus terus melakukan upaya memenuhi kebutuhan pelayanan medis masyarakat dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan tenaga kesehatan yang terdidik dan terlatih.

“

PENDIDIKAN

”

<https://konselkalbps.go.id>



Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu maka setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945.

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat 1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang UU No 20 tahun 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warganegara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Dalam UU No. 20 Tahun 2003, Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar.

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, dan Rasio Murid Guru.

3.1. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Gambar 3.1 Harapan Lama Sekolah Konawe Selatan, 2018-2020



Sumber IPM BPS

Secara matematis, pada dasarnya HLS merupakan Ekspektasi yang artinya menjumlahkan seluruh peluang yang mungkin untuk semua nilai variabel. Jadi misalnya masih ada penduduk usia 60 tahun yang sekolah, akan berpengaruh pada HLS walaupun besarnya tidak signifikan. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Data siswa yang bersekolah di pesantren diperoleh dari Direktorat Pendidikan Islam.

Salah satu tujuan pembangunan pendidikan diantaranya adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan juga meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya akses anak usia sekolah terhadap layanan pendidikan dan proses belajar mengajar di sekolah. Dengan berbagai kebijakan tersebut diharapkan angka putus sekolah menurun. Dengan turunnya angka putus sekolah, secara tidak langsung berdampak pada semakin tingginya harapan lama sekolah bagi penduduk. Keterkaitan antara harapan lama sekolah, angka putus sekolah dan kondisi pendidikan saat ini.

Gambarannya adalah sebagai berikut, jika kebijakan bidang pendidikan kondusif dan mendorong penduduk untuk tetap bersekolah, maka angka putus sekolah akan turun. Jika angka putus sekolah turun, berarti harapan lama sekolah naik. Walaupun mungkin kenaikan itu tidak langsung terlihat pada waktu yang bersamaan. Artinya, dampak terhadap harapan lama sekolah akan terlihat beberapa tahun kedepan. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan manusia yang tidak terjadi secara instan dan tiba-tiba.

Pada tahun 2020, terjadi kenaikan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Konawe Selatan bila dibandingkan dengan tahun 2018. HLS naik dari 12,23 pada tahun 2018 menjadi 12,36 tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA. Kenaikan HLS ini menunjukkan perbaikan kondisi

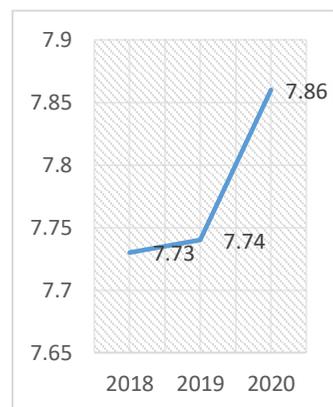
pendidikan di wilayah ini.

Ukuran lain mengenai pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selain itu, penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

RLS di Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2018 tercatat masih berada di angka 7,73 tahun. Kemudian, angka tersebut meningkat di tahun berikutnya menjadi 7,74 tahun. Hingga pada tahun 2020, angka rata-rata lama sekolah Konawe Selatan tercatat sebesar 7,86 tahun. Ini berarti pada tahun 2020, secara rata-rata penduduk Kabupaten Konawe Selatan usia 25 tahun ke atas mengenyam pendidikan hingga kelas VIII (SMP kelas 2). Meski naik, dapat diketahui bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Konawe Selatan yang berusia 25 tahun ke atas putus sekolah saat berada di kelas 2 SMP.

Sesungguhnya, angka RLS mencerminkan kondisi pendidikan suatu wilayah beberapa tahun yang lalu, karena ini merupakan *outcome* dari proses pendidikan. Karena RLS dihitung untuk penduduk usia 25 tahun keatas, artinya penduduk yang saat ini diperkirakan telah menyelesaikan proses pendidikannya. Sedangkan kondisi pendidikan saat ini akan berpengaruh pada angka HLS saat ini dan secara tidak langsung berpengaruh pada angka RLS beberapa tahun kedepan.

Gambar 3.2 Rata-rata Lama Sekolah Konawe Selatan, 2018-2020



Sumber IPM BPS

Tabel 3.1 Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Kabupaten Konawe Selatan, 2018-2020

Indikator	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,22	12,23	12,36
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7,73	7,74	7,86

3.2. Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/ keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikannya yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Semakin tingginya status pendidikan yang dimiliki oleh seseorang diharapkan akan semakin meningkatkan keahlian dan keterampilannya. Dan dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator status pendidikan yang dimiliki juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Pada tahun 2020 penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak atau belum pernah bersekolah sama sekali sebanyak 5,66 persen, di mana mayoritas dari penduduk tersebut berjenis kelamin perempuan. Jika dilihat lebih dalam lagi, sekitar 4,39 persen penduduk laki-laki berusia 5 tahun ke atas memiliki status pendidikan tidak atau belum pernah bersekolah. Sementara dari sisi penduduk perempuan, tercatat sekitar 6,95 persen penduduk perempuan yang berusia 5 tahun ke atas tercatat tidak atau belum pernah bersekolah.

Pada tahun 2020, penduduk laki-laki usia 5 tahun ke atas

PENDIDIKAN

yang masih bersekolah di jenjang SD atau sederajat sebesar 15,83 persen, sedangkan untuk penduduk perempuannya sebesar 16,64 persen. Secara total, penduduk Konawe Selatan usia 5 tahun ke atas yang masih bersekolah di jenjang SD atau sederajat sebesar 16,23 persen, yang paling besar di antara jenjang lainnya.

Pada jenjang SMP atau sederajat, penduduk laki-laki di Konawe Selatan usia 5 tahun ke atas yang tercatat masih bersekolah di jenjang SMP atau sederajat pada tahun 2020 sebanyak 5,30 persen, sementara untuk penduduk perempuannya pada jenjang yang sama tercatat sebesar 6,75 persen. Secara umum, penduduk usia 5 tahun ke atas di Konawe Selatan pada tahun 2020 yang masih bersekolah di jenjang SMP atau sederajatnya sebesar 6,02 persen.

Tabel 3.2 Persentase Penduduk 5 Tahun Keatas Menurut Status Pendidikan, 2020

[Diolah dari Hasil Susenas]

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(3)	(5)	(7)
Tidak/belum Pernah Bersekolah	4,39	6,95	5,66
Masih Sekolah di SD/Sederajat	15,83	16,64	16,23
Masih Sekolah di SMP/Sederajat	5,30	6,75	6,02
Masih Sekolah di SMA ke Atas	7,14	6,21	6,68
Tidak bersekolah lagi	67,34	63,46	65,41

Pada jenjang SMA ke atas, penduduk laki-laki di Konawe Selatan usia 5 tahun ke atas yang tercatat masih bersekolah di jenjang SMA ke atas pada tahun 2020 sebanyak 7,14 persen, sementara untuk penduduk perempuannya pada jenjang yang sama tercatat sebesar 6,21 persen. Secara umum, penduduk usia

5 tahun ke atas di Konawe Selatan pada tahun 2020 yang masih bersekolah di jenjang SMA ke atas sebesar 6,68 persen.

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, secara umum pada tahun 2020 penduduk dengan jenis kelamin perempuan mempunyai kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini tercermin dari persentase penduduk yang masih bersekolah di tiap-tiap jenjangnya di mana penduduk perempuan rata-rata memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, pada persentase penduduk yang tidak/belum pernah bersekolah juga menunjukkan persentase penduduk laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk perempuan masih memiliki kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki

3.3. Tingkat Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS adalah rasio anak yang sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama. APS untuk menilai pencapaian MDGs yaitu melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan, namun bukan berarti meningkatnya APS juga meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. APM merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

PENDIDIKAN

Pada tahun 2020, Angka Partisipasi Sekolah untuk penduduk usia 7-12 tahun mencapai 99,60 persen atau dengan kata lain semua anak usia 7-12 tahun hampir semua sudah bersekolah. Angka tersebut menunjukkan sedikit penurunan dibanding 2 tahun sebelumnya. Tahun 2018 hanya terdapat sekitar 0,25 persen anak usia 7-12 tahun yang belum bersekolah.

Untuk penduduk dengan kelompok usia 13-15 tahun, masih banyak anak yang tidak bersekolah. Pada tahun 2020 terdapat sebesar 2,63 persen penduduk usia 13-15 tahun yang tidak mengenyam pendidikan. Sedangkan tahun 2018, terdapat sebesar 3,67 persen anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah. Peningkatan APS usia 13-15 tahun tersebut menunjukkan terjadinya penurunan jumlah anak putus sekolah pada kelompok umur 13-15 tahun dalam 2 tahun terakhir.

Tahun 2020, APS penduduk usia 13-15 dan usia 16-18 tahun lebih besar dibanding APS 2 tahun sebelumnya, menunjukkan terjadinya penurunan jumlah anak putus sekolah pada kelompok umur tersebut.

Penduduk dengan kelompok usia 16-18 tahun, Angka Partisipasi Sekolah semakin kecil atau dengan kata lain persentase penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah semakin besar. Pada tahun 2018 hanya terdapat sebesar 67,96 persen penduduk usia 16-18 tahun yang sedang mengenyam pendidikan. Sedangkan tahun 2020, terdapat sebesar 68,97 persen penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah. Peningkatan APS penduduk usia 16-18 tahun dalam 2 tahun tersebut menunjukkan berkurangnya jumlah penduduk putus sekolah pada kelompok umur 16-18 tahun.

Pada Tabel 3.3 menunjukkan bahwa APS penduduk laki-laki maupun perempuan pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok, sedangkan pada kelompok umur 16-18 tahun APS laki-laki lebih rendah dibandingkan APS perempuan. Secara umum, partisipasi sekolah tahun 2020 menunjukkan peningkatan pada beberapa kelompok usia dibandingkan 2 tahun sebelumnya kecuali kelompok usia 7-12 tahun yang mengalami sedikit penurunan sebesar 0,15 persen.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin, 2018-2020

Indikator Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2018	2020	2018	2020	2018	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
APS						
-7-12 tahun	100,00	99,20	99,47	100,00	99,75	99,60
-13-15 tahun	96,63	95,95	96,07	98,85	96,33	97,37
-16-18 tahun	60,25	61,93	75,88	78,06	67,96	68,97
APM						
- SD/MI	97,01	99,20	99,47	98,26	98,17	98,72
- SMP/MTs	89,54	68,29	63,09	81,63	75,60	74,83
- SMA/SMK/MA	53,71	55,78	62,98	63,13	58,28	58,99

Peningkatan APM terjadi pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMA/SMK/MA dalam 2 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan menyekolahkan untuk anak-anak mereka pada jenjang SD/MI dan juga SMA/SMK/MA. Secara umum APM SD pada tahun 2018 tercatat sebesar 98,17 persen meningkat menjadi 98,72 persen pada tahun 2020. APM SMA/SMK/MA yang juga mengalami peningkatan berhasil bertambah 0,71 poin dari 58,28 persen pada tahun 2018 menjadi 58,99 persen pada tahun 2020. Satu-satunya jenjang pendidikan yang mengalami penurunan adalah tingkat SMP yang menurun dari 75,60 persen di tahun 2018 menjadi 74,83 persen di tahun 2020.

Pada tingkat pendidikan SD tahun 2020, APM laki-laki lebih besar bila dibandingkan dengan APM perempuan.

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2020 APM pada tingkat pendidikan SD untuk laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Sedangkan, untuk APM pada tingkat Pendidikan SMP dan SMA sederajat untuk laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan. APM SD untuk laki-laki tercatat sebesar 99,20 persen pada tahun 2020, sedangkan APM SD untuk perempuan sebesar 98,26 persen. Pada tingkat pendidikan SMP, APM laki-laki

sebesar 68,29 persen, dibanding APM perempuan sebesar 81,63 persen pada tahun 2020. Pada jenjang pendidikan SMA, APM laki-laki tercatat sebesar 55,78 persen berbanding 63,13 persen APM perempuan.

3.4. Kualitas Pelayanan Pendidikan

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pembangunan nasional khususnya dalam bidang pendidikan yaitu pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan mutu layanan pendidikan merupakan program utama pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan bangsa. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan pendidikan antara lain rasio murid-guru dan rasio murid-kelas.

Rasio murid-guru adalah jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid per guru dapat memberikan gambaran mengenai besarnya beban kerja guru dalam mengajar. Rasio murid-guru ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu. Hal ini umumnya diasumsikan bahwa rasio murid-guru yang rendah menandakan kelas yang lebih kecil sehingga memungkinkan para guru untuk lebih memperhatikan setiap siswa dan meningkatkan efektivitas pengajaran. Indikator ini tidak memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas belajar/mengajar, seperti perbedaan dalam kualifikasi guru, pelatihan pedagogi, pengalaman dan status, metode pengajaran, kondisi bahan ajar dan variasi di dalam kelas.

Selama kurun waktu tahun ajaran 2016/2017 hingga 2019/2020 rasio murid-guru menunjukkan angka yang cenderung naik turun, dimana pada tahun pelajaran 2016/2017 Rasio Murid-Guru SD tercatat sebesar 14, dan kemudian naik di tahun pelajaran berikutnya menjadi 15 dan turun kembali menjadi 14

pada tahun pelajaran 2019/2020. Pada jenjang pendidikan SMP Rasio Murid-Guru sebesar 14 pada tahun pelajaran 2019/2020 cenderung konstan bila dibandingkan tahun pelajaran 2016/2017 yang tercatat sebesar 15. Sementara pada jenjang pendidikan SMA, Rasio Murid-Guru tercatat 14 pada tahun pelajaran 2016/2017, naik menjadi 15 pada tahun pelajaran 2019/2020.

Indikator berikutnya adalah rasio murid per sekolah. Rasio murid per sekolah adalah perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah sekolah di setiap jenjang pendidikan. Rasio murid per sekolah digunakan untuk mengetahui rata-rata besarnya kepadatan murid suatu sekolah di daerah tertentu. Semakin tinggi nilai rasio, berarti tingkat kepadatan murid semakin tinggi atau dapat dikatakan bahwa jumlah siswa yang ada di dalam sekolah tersebut tinggi. Tingginya rasio murid per sekolah juga akan memberikan dampak pada rendahnya efektivitas proses belajar mengajar.

Selama kurun waktu tahun ajaran 2016/2017 hingga 2019/2020 rasio murid-sekolah tercatat cukup berfluktuatif. Pada periode pendidikan 2016/2017, rasio murid-sekolah pada jenjang pendidikan SD sebesar 119, kemudian terus menurun sampai pada periode 2019/2020 tercatat sebesar 113. Angka tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir terjadi penurunan beban murid setiap sekolah pada jenjang pendidikan SD. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMP, rasio murid-sekolah dalam kurun waktu 4 tahun terakhir menunjukkan penurunan jumlah murid pada setiap sekolah. Pada tahun pelajaran 2016/2017 rata-rata setiap sekolah mendidik 204 murid, kemudian terus menurun pada tahun pelajaran 2019/2020 menjadi 165, artinya setiap sekolah mempunyai beban sebanyak 165 murid untuk dididik.

Penurunan rasio murid-sekolah terjadi pada jenjang pendidikan baik SD - SMA dalam kurun waktu ajaran 2016/2017 hingga 2019/2020. Pada tahun pelajaran 2016/2017 terdapat sebanyak 315 murid SMA sederajat setiap sekolah menjadi sebanyak 236 murid pada tahun pelajaran 2017/2018. Kemudian

PENDIDIKAN

angka tersebut meningkat kembali menjadi 262 pada tahun ajaran 2018/2019 maupun 2019/2020. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas proses belajar mengajar di tingkatan pendidikan SMA semakin membaik dalam 4 tahun terakhir.

Tabel 3.4 Perkembangan Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid-Sekolah, 2016/2017-2019/2020

Tahun	Rasio Murid-Guru			Rasio Murid-Sekolah		
	SD	SMP	SM	SD	SMP	SM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2016/2017	14	15	14	119	204	315
2017/2018	15	14	13	118	168	236
2018/2019	13	13	14	114	164	262
2019/2020	14	14	15	113	165	262

Catatan : * SM meliputi SMA, SMK, dan MA

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan

“

KETENAGAKERJAAN

”

<https://konselkabps.go.id>



Salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah adalah permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) kondisi Agustus. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha serta persentase pekerja menurut status pekerjaan.

4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur pencapaian hasil pembangunan. Selain itu TPAK juga merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, yang merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas).

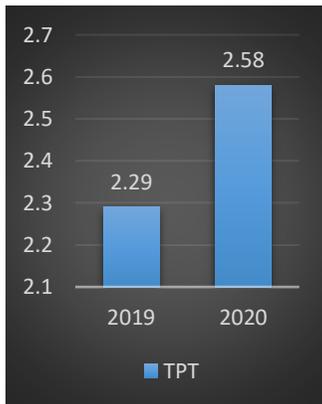
TPAK pada kondisi bulan Agustus 2020 untuk penduduk laki-laki mengalami penurunan sebesar 1.89 poin jika dibandingkan dengan kondisi yang sama pada tahun sebelumnya yaitu bulan Agustus 2019, sedangkan penduduk perempuan mengalami peningkatan sebesar 1.31 poin. TPAK secara umum mengalami penurunan sebesar 0,44 poin, yaitu dari 71,59 persen pada Agustus 2019 menjadi 71,15 persen pada Agustus 2020. Peningkatan TPAK ini merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk ekonomi aktif untuk mencari atau melakukan kegiatan ekonomi.

Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka, 2019 dan 2020

[Diolah dari Hasil Sakernas]

Jenis Kelamin	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka	
	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-Laki	89,59	87,70	2,21	2,96
Perempuan	52,65	53,96	2,44	1,94
Laki-Laki + Perempuan	71,59	71,15	2,29	2,58

Gambar 4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Konawe Selatan, 2019-2020



Sumber : Hasil Sakernas, 2019-2020

Secara umum, Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2020 menunjukkan peningkatan dibanding Agustus 2019. TPT Agustus 2019 tercatat sebesar 2,29 persen, meningkat menjadi 2,58 persen pada agustus 2020. Peningkatan TPT ini mengindikasikan menurunnya penyerapan tenaga kerja bila dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini dipicu dengan adanya wabah covid-19 yang berdampak pada beberapa sektor ekonomi di Kabupaten Konawe Selatan. Selain itu, peningkatan TPT ini berkaitan dengan jumlah lapangan kerja yang terbatas dan adanya kecenderungan penyerapan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Sehingga, perlu adanya perhatian dari pemerintah terkait untuk menyediakan lapangan usaha guna menurunkan angka pengangguran.

4.2. Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan

Harapan setiap individu adalah mudah mendapatkan pekerjaan layak, sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada makin tinggi harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya. Namun karena keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Tidak sedikit juga dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan, sehingga sebagian dari mereka banyak yang menjadi pengangguran.

Secara umum, angka TPT untuk penduduk dengan tingkat pendidikan SMA ke atas tercatat sebesar 5,39 persen pada Agustus 2018. Berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan, terlihat bahwa TPT tertinggi tercatat pada jenjang pendidikan Diploma/Akademi (20,11 persen), kemudian diikuti oleh jenjang Universitas (10,48 persen), dan jenjang SMA (3,50 persen). Sedangkan TPT terendah ditunjukkan pada jenjang pendidikan SMK. Tingginya TPT penduduk dengan jenjang pendidikan SMA keatas tersebut mengindikasikan bahwa lapangan kerja yang

terdapat di Kabupaten Konawe Selatan masih harus ditingkatkan, terutama untuk menyerap penduduk yang dengan tingkat pendidikan SMA keatas. Selain itu, pemerintah masih harus mendorong menciptakan lapangan pekerjaan baru karena masih banyak setengah pengangguran yang masih bekerja paruh waktu. Kondisi mereka ini rentan jika terjadi guncangan ekonomi, bisa terdorong ke kategori pengangguran terbuka.

Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan, 2019-2020

[Diolah dari Hasil Sakernas, Agustus 2019-2020]

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Tingkat Pengangguran Terbuka	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
SD	0,91	0,25
SMP	0,90	1,36
SMA	5,46	5,92
Perguruan Tinggi	1,72	3,49
Total	2,29	2,58

4.3. Lapangan Usaha

Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran maupun penduduk yang bekerja, sangat erat kaitannya dengan kinerja sektor-sektor perekonomian atau lapangan usaha di suatu wilayah. Jumlah penduduk yang bekerja menunjukkan kemampuan lapangan usaha ekonomi dalam menyerap tenaga kerja. Sebaliknya, tingginya angka pengangguran menunjukkan ketidakmampuan sektor-sektor ekonomi menyerap tenaga kerja yang ada di wilayah tersebut.

Secara umum penduduk Kabupaten Konawe Selatan pada Agustus 2020 lebih banyak bekerja pada lapangan usaha Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan. Lapangan usaha tersebut menyerap tenaga kerja sebanyak

73.641 orang atau sekitar 46,72 persen dari seluruh penduduk 15 tahun keatas yang bekerja. Lapangan usaha yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar kedua adalah Jasa yakni sebanyak 54.817 orang atau sekitar 34,77 persen.

Berdasarkan jenis kelamin penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja, penduduk laki-laki di Kabupaten Konawe Selatan lebih banyak bekerja pada lapangan usaha Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan, yakni sebanyak 50,56 persen dari total penduduk laki-laki berumur 15 tahun ke atas yang bekerja seminggu yang lalu. Sementara, penduduk perempuan lebih banyak bekerja di bidang Jasa yaitu sebanyak 29.828 atau setara dengan 50,54 persen dari penduduk perempuan berumur 15 tahun ke atas yang bekerja seminggu yang lalu.

Tabel 4.3 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Utama, 2019 dan 2020

[Diolah dari Hasil Sakernas, Agustus]

Lapangan Usaha	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki + Perempuan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan	-	49.864	-	23.777	68.990	73.641
Industri pengolahan, Pertambangan dan Penggalian, dan industry lainnya	-	23.760	-	5.404	30.112	29.164
Jasa	-	24.989	-	29.828	50.445	54.817

4.4. Status Pekerjaan

Status pekerjaan didefinisikan sebagai jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Status pekerjaan juga dapat berkaitan dengan besarnya penghasilan yang diterima oleh pekerja.

Secara umum, penduduk Kabupaten Konawe Selatan usia 15 tahun ke atas bekerja dengan status sebagai

buruh/karyawan/pegawai. Tahun 2020 tercatat sebanyak 22,99 persen penduduk usia 15 tahun ke atas bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai. Angka tersebut lebih rendah dibanding kondisi tahun 2019 yang mencapai 23,52 persen. Sementara itu, penduduk usia 15 tahun keatas yang berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga tercatat sebanyak 22,33 persen tahun 2020. Angka tersebut sedikit menurun dibanding tahun 2019 yang mencapai 23,14 persen.

Tabel 4.4 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan, 2019-2020

[Diolah dari Hasil Sakernas, Agustus]

Status Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki + Perempuan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Berusaha sendiri	19,45	24,05	16,27	19,20	18,31	22,24
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga	27,67	25,94	15,02	16,30	23,14	22,33
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	6,68	4,53	1,30	1,19	4,76	3,28
Buruh/karyawan/pegawai	25,73	24,37	19,56	20,69	23,52	22,99
Pekerja bebas di pertanian	1,12	1,66	0,90	1,70	1,05	1,67
Pekerja bebas di nonpertanian	6,47	7,50	0,97	0,90	4,50	5,03
Pekerja keluarga/tidak dibayar	12,88	11,95	45,98	40,02	24,72	22,46

Jika dilihat dari jenis kelamin penduduk, secara umum pada tahun 2019-2020 penduduk laki-laki lebih banyak bekerja sebagai pekerja yang dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga. Tahun 2019, penduduk laki-laki tercatat sebanyak 27,67 persen, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 25,94 persen. Sebaliknya untuk perempuan justru lebih banyak yang berstatus sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar. Pada tahun 2019, penduduk perempuan yang berstatus pekerja keluarga/tidak dibayar ada sebanyak 45,98 persen, turun sedikit sehingga tahun 2020 menjadi sebanyak 40,02 persen.

“TARAF DAN POLA KONSUMSI”



Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

5.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan, di mana pengeluaran bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, barang dan jasa, pakaian, barang tahan lama, dan pengeluaran untuk barang-barang lainnya selain dari pengeluaran untuk makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsinya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 5.1 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran, 2019-2020

[Diolah dari Hasil Susenas]

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan			
	Nominal (Rp)		Persentase (%)	
	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	438.096	486.221	48,54	53,94
Bukan Makanan	464.512	415.211	51,46	46,06
Jumlah	902.608	901.432	100,00	100,00

Selama periode 2019-2020 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk mengalami penurunan dari Rp902.608,- menjadi Rp901.432,-. Bila dilihat proporsi pengeluaran penduduk, persentase pengeluaran untuk makanan mengalami peningkatan dari 48,54 persen pada tahun 2019 menjadi 53,94 persen pada tahun 2020. Sebaliknya, proporsi pengeluaran bukan makanan menurun dari 51,46 persen menjadi 46,06 persen. Pergeseran pola konsumsi yang lebih banyak dikeluarkan untuk makanan memperlihatkan bahwa masyarakat mulai mengurangi kebutuhan non makanannya guna memenuhi konsumsi makanan.

Secara umum, rata-rata pengeluaran untuk makanan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 10,98 persen dibanding dengan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp.438.096,- menjadi Rp.486.221,- perkapita sebulan. Sementara pada pengeluaran bukan makanan, terjadi penurunan sebesar 10,61 persen dari Rp.464.512,- pada tahun 2019 menjadi Rp.415.211,- perkapita sebulan pada tahun 2020.

Pada pengelompokan distribusi pengeluaran, rumah tangga dibagi menjadi tiga kelompok yang tidak sama besar. Hal ini bertujuan untuk melihat kemampuan masyarakat dalam pola pengeluaran sehari-hari. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata pengeluaran makanan masyarakat dengan pengeluaran 40 persen bawah adalah sebesar Rp309.460,- dan

nonmakanan sebesar Rp153.329,-. Nilai tersebut akan terlihat jauh berbeda jika kita membandingkan dengan pengeluaran kelompok masyarakat yang berada pada kelompok 20% atas.

Selain itu, kita juga dapat melihat pola pengeluaran yang berbeda antara 3 kelompok masyarakat tersebut. Pada kelompok masyarakat 40% bawah dan 40% tengah cenderung memiliki pengeluaran makanan yang lebih besar dibandingkan dengan nonmakanannya. Namun pada kelompok masyarakat 20% atas justru pengeluaran nonmakanan memiliki porsi lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran makanannya.

Tabel 5.2 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Non Makanan menurut Kuintil Pengeluaran, 2020 (Rupiah)

[Diolah dari Hasil Susenas]

Distribusi Pengeluaran	Makanan	Non Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
40% Bawah	309 460	153 329	462 789
40% Tengah	504 871	387 259	892 129
20% Atas	803 764	997 684	1 801 448

5.2. Konsumsi Energi dan Protein

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang

TARAF DAN POLA KONSUMSI

menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2015 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2014), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kkal dan 57 gram protein.

Rata-rata konsumsi kalori penduduk pada tahun 2020 sebanyak 1.788,94 kkal/hari untuk kelompok masyarakat 40% bawah, 2.164,66 kkal/hari untuk kelompok masyarakat 40% tengah, dan 2.476,94 kkal/hari untuk 20% atas. Hal ini berarti konsumsi kalori per hari penduduk tahun 2020 untuk 40% persen kelompok pengeluaran bawah belum memenuhi syarat kecukupan gizi berdasarkan Widya Karya Pangan dan Gizi untuk kategori kecukupan energi. Kelompok masyarakat 40% tengah dan 20% atas saja yang telah mampu memenuhi kebutuhan kalori perkapita per hari. Dalam hal konsumsi protein, rata-rata masyarakat Konawe Selatan mengonsumsi 59,32 gram per kapita per hari. Dengan demikian, jumlah protein yang dikonsumsi penduduk Kabupaten Konawe Selatan secara umum telah mampu memenuhi ketentuan atau batas kecukupan gizi yang direkomendasikan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi.

Tabel 5.3 Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari menurut Kuintil Pengeluaran, 2020

[Diolah dari Hasil Susenas]

Kuintil Pengeluaran	Kalori (kkal/kapita/hari)	Protein (gram/kapita/hari)
(1)	(2)	(3)
40% Bawah	1 788,94	48,01
40% Tengah	2 164,66	62,60
20% Atas	2 476,94	75,46

“

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

”



Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang, yang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Selain itu rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberian ketentraman hidup bagi manusia dan menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi status kesehatan penghuninya.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

UU No. 1 Tahun 2013 menyebutkan salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas, sumber air minum, sumber air utama untuk keperluan sehari-hari, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

6.1. Sumber Air Pada Rumah Tangga

Salah satu Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kebersihan dan kesehatan lingkungan masyarakat adalah sumber air utama yang digunakan untuk mandi, memasak, mencuci, dan lain-lain. Pada tahun 2019-2020, mayoritas masyarakat Konawe Selatan memanfaatkan sumur atau mata air terlindung untuk keperluan sehari-hari. Pada tahun 2019, sebanyak 58,12 persen rumah tangga di Konawe Selatan memanfaatkan sumur/mata air terlindung untuk keperluan sehari-hari. Angka tersebut kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi sebanyak 57,25 persen saja yang tercatat menggunakan sumur/mata air terlindung untuk keperluan sehari-hari. Selain itu, pada tahun 2020 tercatat masih ada sebanyak 0,90 persen penduduk yang masih menggunakan air yang bersumber dari sungai, danau, waduk, irigasi, dll untuk keperluan mandi/cuci/dll.

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Mata Air Untuk Keperluan Sehari-hari, 2019-2020
[Diolah dari Hasil Susenas]

Indikator Kualitas Perumahan	Tahun	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Sumber air utama untuk mandi, memasak, cuci, dll		
Air kemasan/isi ulang	-	-
Leding	-	-
Sumur bor/pompa	21,52	28,05
Sumur/mata air terlindung	58,12	57,25
Sumur/mata air tak terlindung	19,53	13,81
Lainnya (sungai, danau, waduk, irigasi, dll)	-	0,90

6.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas dalam menunjang kebersihan dan sanitasi yang baik dalam suatu rumah tinggal. Sanitasi yang baik merupakan faktor utama yang mendukung bagi kesehatan masyarakat yang tinggal dalam suatu lingkungan. Kelayakan sanitasi tersebut dapat dilihat dari jenis kloset yang digunakan, penggunaan jamban milik sendiri, hingga ketersediaan tangki septik sebagai tempat penampungan akhir kotoran.

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri maupun jamban yang sudah memiliki tangki septik. Pada tahun 2020, rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri sebanyak 82,38 persen, sisanya sebanyak 17,62 persen masih menggunakan fasilitas bersama, MCK umum, dan tidak ada/tidak menggunakan fasilitas buang ier besar.

Sistem pembuangan dengan jenis leher angsa bertujuan agar kotoran tidak langsung jatuh ke lubang penampungan kotoran. Hal ini secara tak langsung menghalangi mikroba dan bakteri yang keluar dari kotoran. Selain itu, penggunaan kloset leher angsa juga agar bakteri yang ada pada septic tank tidak keluar dan mencemari toilet. Pada tahun 2020, rumah tangga di Kabupaten Konawe Selatan yang telah memiliki kloset dengan jenis leher angsa mencapai 90,64 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan bila dibandingkan tahun 2019, di mana hanya terdapat 86,89 persen rumah tangga yang telah memiliki kloset dengan leher angsa di rumahnya.

Sementara itu, kondisi berbeda justru terjadi pada persentase rumah tangga yang menguasai kepemilikan jamban dengan tangki septik, SPAL. Pada tahun 2020, sebanyak 82,87% rumah tangga di Konawe Selatan telah memiliki jamban dengan tangki septik, SPAL di rumahnya. Angka tersebut meningkat cukup tinggi dari tahun sebelumnya di mana pada tahun 2019 hanya terdapat 70,61% rumah tangga yang memiliki jamban dengan tangki septik, SPAL di rumahnya. Peningkatan kepemilikan jamban dengan adanya tangki septik ini mengindikasikan bahwa masyarakat Konawe Selatan semakin peduli mengenai sanitasi dan kesehatan lingkungannya.

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2019-2020

[Diolah dari Hasil Susenas]

Fasilitas Perumahan	Tahun	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Kloset dengan leher angsa	86,89	90,64
Jamban sendiri	82,41	82,38
Jamban dengan tangki septik, IPAL	70,61	82,87

Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas, 2019-2020



Sumber Hasil Susenas, 2019-2020

6.3. Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil Susenas 2020, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 96,95 persen. Sisanya, sebanyak 3,05 persen rumah tangga menempati rumah bukan milik sendiri yang terdiri dari kontrak/sewa, bebas sewa/rumah dinas/lainnya. Kepemilikan rumah tinggal milik sendiri tahun 2020 tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya di mana pada tahun 2019 hanya terdapat 93,05 persen rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri.

Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2019-2020

[Diolah dari Hasil Susenas]

Status Kepemilikan Rumah Tinggal	Tahun	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Milik Sendiri	93,50	96,95
Bukan Milik Sendiri	6,50	3,05

“

KEMISKINAN

”

<https://konselkabbps.go.id>



Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap wilayah, termasuk Sulawesi Tenggara. Angka kemiskinan yang masih tinggi menunjukkan program pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomiyang tidak disertai dengan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi sehingga pembangunan yang dijalankan belum mampu menekan angka kemiskinan secara optimal.

Pentingnya pemberantasan kemiskinan ditunjukkan salah satunya dengan tujuan MDGs yang pertama yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan. Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui program pro-rakyat menggunakan pendekatan holistik, seperti program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan mata pencaharian. Mengentaskan kemiskinan membutuhkan bantuan dari semua pihak, baik dari pemerintah, maupun dari lembaga penelitian, sektor swasta, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik.

7.1. Perkembangan Penduduk Miskin

Penduduk miskin di Kabupaten Konawe Selatan menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2016-2020. Tahun 2016, jumlah penduduk miskin sebesar 33,94 ribu jiwa atau 11,45 persen dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Konawe Selatan. Pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan hingga pada tahun berikutnya angka kemiskinan berhasil turun menjadi 33,73 ribu jiwa atau sebesar 11,14 persen. Hingga pada

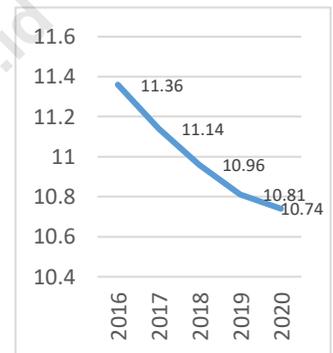
KEMISKINAN

tahun 2020 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin menjadi 34,22 ribu jiwa atau setara dengan 10,74 persen.

Tabel 7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Konawe Selatan, 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
2016	33,94	11,36
2017	33,73	11,14
2018	33,73	10,95
2019	33,89	10,81
2020	34,22	10,74

Gambar 7.1 Tren Tingkat Kemiskinan, 2016-2020



Sumber Hasil Susenas, 2020

Catatan :Data kemiskinan merupakan kondisi bulan Maret

7.2. Garis Kemiskinan (GK)

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Konawe Selatan mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2016-2020. Garis kemiskinan Kabupaten Konawe Selatan tahun 2016 tercatat sebesar Rp. 195.175,- per kapita per bulan. Pada tahun 2017 garis kemiskinan meningkat menjadi sebesar Rp. 200.663,- per kapita per bulan, hingga kemudian tahun 2020 meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 261.382,- per kapita per bulan.

Dengan demikian, selama tahun 2016-2020, garis kemiskinan di Konawe Selatan telah meningkat sebesar 33,5 persen. Catatan kondisi rata-rata pengeluaran penduduk miskin

yang cenderung makin menjauhi garis kemiskinan, disertai ketimpangan pengeluaran penduduk miskin yang juga semakin melebar, hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan ketimpangan pendapatan lebih kepada kelompok penduduk tidak miskin. Sementara, kelompok penduduk miskin masih menerima pendapatan yang cukup rendah sehingga tidak mampu mengangkat taraf ekonominya. Di saat yang sama, besaran pengeluaran yang dibutuhkan untuk keluar dari kemiskinan juga mengalami peningkatan.

Tabel 7.2 Garis Kemiskinan(Rp/Kapita/Bulan), 2016-2020

Tahun	Indikator
	Garis Kemiskinan
(1)	(2)
2016	195.175
2017	200.663
2018	219.979
2019	235.654
2020	261.382

Sumber : Konawe Selatan Dalam Angka, 2020

“

SUMBER DATA

”

<https://konselkabps.go.id>



SUMBER DATA

Sensus Penduduk

Sensus Penduduk (SP) diselenggarakan tiap 10 tahun untuk mengumpulkandata dasar penduduk dan rumah tangga di seluruh wilayah geografis Indonesia. Sejak era kemerdekaan Indonesia telah menyelenggarakan 6 kali sensus penduduk yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010.

SP menggunakan dua tahap pencacahan; yaitu, pencacahan lengkap dan pencacahan secara sampel. Pencacahan lengkap meliputi semua orang yang berada di wilayah geografis Indonesia, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing (kecuali anggota Korps Diplomatik beserta keluarganya), awak kapal berbendera Indonesia dalam perairan Indonesia, maupun para tuna wisma (gelandangan) yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Pencacahan sampel mencakup semua penduduk yang bertempat tinggal di blok-blok sensus/wilayah pencacahan yang terpilih secara acak dan mencakup sekitar 5 persen rumah tangga.

Survei Sosial Ekonomi Nasional

Kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dimulai pada tahun 1963. Sampai dengan tahun 2010 telah diadakan 40 kali survei. Susenas mengumpulkan data kependudukan, pendidikan, kesehatan/gizi, perumahan/lingkungan hidup, kegiatan sosial budaya, konsumsi dan pendapatan rumah tangga, dan perjalanan. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang umum dikumpulkan melalui pertanyaan kor (pokok) setiap tahun. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang lebih spesifik, dikumpulkan melalui pertanyaan modul setiap tiga tahun. Pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan secara berkala dalam pertanyaan modul adalah:

- a) Konsumsi/Pengeluaran
- b) Kesehatan, Perumahan dan Pemukiman
- c) Sosial Budaya dan Pendidikan.

Sampai tahun 1991 ukuran sampel Susenas beragam dari 25 ribu sampai 100 ribu rumah tangga. Pada tahun 1992, sistem pengumpulan data Susenas diperbaharui, yaitu informasi yang digunakan untuk menyusun Inkesra yang terdapat dalam modul (keterangan yang dikumpulkan tiga tahun sekali) ditarik ke dalam kor (kelompok keterangan yang dikumpulkan tiap tahun). Pada tahun 1993 ukuran sampelnya menjadi sekitar 205 ribu rumah tangga.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah sampel rumah tangga juga meningkat. Pada tahun 2010, jumlah sampel rumah tangga mencapai lebih dari 300 ribu rumah tangga tepatnya sekitar 304.368 rumah tangga. Peningkatan jumlah sampel tersebut akan memungkinkan dilakukan penyajian data sampai tingkat kabupaten/kotamadya. Dengan adanya peningkatan jumlah sampel tersebut BPS melibatkan mitra statistik selain mitra statistik dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan. Mulai tahun 2011 Susenas dilaksanakan secara Triwulan yaitu Triwulan I dilaksanakan bulan Maret, Triwulan II dilaksanakan bulan Juni, Triwulan III dilaksanakan bulan September, dan Triwulan IV dilaksanakan bulan Desember. Setiap Triwulan didistribusikan sampel sebanyak 75.000 rumah tangga.

Survei Angkatan Kerja Nasional

Kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pertama kali dilakukan pada tahun 1976 untuk melengkapi data kependudukan khususnya ketenagakerjaan. Sejak tahun 1986-1993, pelaksanaan Sakernas dilakukan 4 kali dalam setahun pada bulan-bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Tetapi mulai 1994-2001 pelaksanaannya dilakukan sekali dalam setahun yaitu sekitar bulan Agustus dengan sampel sekitar 65.000 rumah tangga. Selama periode tahun 2002-2004, Sakernas

selain dilakukan secara triwulanan juga dilakukan secara tahunan. Pada tahun 2005 - 2011 Sakernas dilakukan semesteran. Untuk tahun 2005, Sakernas dilakukan pada bulan Februari dan November, sedangkan pada tahun 2006 - 2011 dilakukan pada bulan Februari dan Agustus.

Sumber Data Lainnya

Selain dari sensus dan survei, Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat juga menggunakan data yang berasal dari catatan administrasi kementerian/Instansi pemerintah di luar BPS sebagai sumber data sekunder diantaranya dinas pendidikan, dinas kesehatan, dukcapil, dll.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Jalan Poros 60, Andoolo, Komplek Perkantoran PEMDA. Telp (0401) 3088520
Website : <http://konselkab.bps.go.id> E-mail : bps7405@bps.go.id